

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
*THE INFLUENCE OF GOVERNMENT POLICIES ON POVERTY IN THE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI***

TAUFIK HIDAYAT

A032212003



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***THE INFLUENCE OF GOVERNMENT POLICIES ON POVERTY IN THE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI***

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

Disusun dan diajukan oleh:

TAUFIK HIDAYAT

A032212003



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
*THE INFLUENCE OF GOVERNMENT POLICIES ON POVERTY IN THE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI***

disusun dan diajukan oleh

**Taufik Hidayat
A032212003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 31 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Madris, DPS., SE., M.Si., CWM
NIP. 196012311988111002

Pembimbing Pendamping

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM
NIP. 196305161990031001

Ketua Program Studi Magister Ekonomi
Pembangunan dan Perencanaan

Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM
NIP. 196510121999032001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Taufik Hidayat

NIM : A032212003

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa Karya Tulis yang saya ajukan sebagai persyaratan menyelesaikan studi pada Program Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin adalah benar-benar karya asli sendiri bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Saya akan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara priadi maupun sanksi secara hukum yang berkaitan dengan karya tulis saya.

Makassar, 23 Februari 2024



Taufik Hidayat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan tesis yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan”** dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Mempersembahkan tesis ini terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Sampara S.Pd. dan Ibunda Hj. Halija S.Pd. terimakasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulisan dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Tidak lupa rasa terimakasih sekaligus mengirimkan doa kepada kakek dan nenek almarhum H. Anas dan almarhuma Hj. Asia, yang semasa hidupnya sangat berarti bagi penulis. Sekaligus terimakasih kepada keluarga besar tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga terwujudnya tesis ini, tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, telah mengarahkan, memberi masukan dan saran serta motivasi dalam proses penyusunan penelitian, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
2. Bapak Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. CWM dan bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. CWM sebagai dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping saya, yang telah tulus dan banyak meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan saran serta motivasi dalam proses penyusunan penelitian, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
3. Bapak Dr. Sulatan Suhab, SE., MS, Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CWM., CSF dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan, serta nasihat yang membangun dalam proses penyusunan tesis, sehingga tesis ini terselesaikan.

4. Seluruh dosen program studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Rahman Kadir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bentuk pelayanan serta memberikan fasilitas didalam perkuliahan dan persetujuan mengadakan penelitian sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu pegawai beserta staf akademik pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas memberikan pelayanan untuk setiap pengurusan berkas proses penyelesaian studi.
7. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, namun membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirya, penulis mendoakan semoga kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan, termasuk yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Makassar, 23 Februari 2024



Taufik Hidayat

ABSTRAK

TAUFIK HIDAYAT. *Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Madris dan Anas).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pengaruh APBD terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, (2) mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, dan (3) mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. APBD berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: APBD, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Provinsi Sulawesi Selatan



ABSTRACT

TAUFIK HIDAYAT. *An Analysis of the Effect of Government Policy on Poverty in South Sulawesi Province* (supervised by Madris and Anas)

This study aims to (1) determine the effect of regional budget (APBD) on poverty either directly or indirectly through economic growth, (2) determine the effect of inflation on poverty either directly or indirectly through economic growth, and (3) determine the effect of economic growth on poverty in South Sulawesi Province. The data used were secondary data obtained from the Statistics Agency (BPS). The analysis method used was panel data analysis method. The research findings show that the regional budget (APBD) has a positive and significant effect on economic growth in South Sulawesi Province, and the regional budget (APBD) has a positive and significant effect on poverty in South Sulawesi Province. Meanwhile, the regional budget (APBD) has a negative and significant effect on poverty through economic growth in South Sulawesi Province. Inflation has a positive and insignificant effect on economic growth in South Sulawesi Province. Besides, inflation has a positive and insignificant effect on poverty in South Sulawesi Province. Inflation also has a negative and insignificant effect on poverty through economic growth in South Sulawesi Province. Meanwhile, economic growth has a negative and significant effect on poverty in South Sulawesi Province.

Keywords: APBD, inflation, economic growth, poverty, South Sulawesi Province



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Konsep	11
2.1.1 Definisi Kemiskinan	11
2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan	14
2.1.3 Indikator Kemiskinan	15
2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	15
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi	18

2.1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	19
2.1.7 Fungsi APBD.....	21
2.1.8 Inflasi.....	22
2.1.9 Jenis Inflasi.....	23
2.2 Tinjauan Teoritis	26
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	32
2.3.1 Hubungan Variabel Pengeluaran Pemerintah/APBD Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	32
2.3.2 Hubungan Variabel Inflasi Dengan Pertumbuhan Ekonom	33
2.3.3 Hubungan Variabel Pengeluaran Pemerintah/APBD Dengan Kemiskinan	35
2.3.4 Hubungan Variabel Inflasi Dengan Kemiskinan	36
2.3.5 Hubungan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan.....	37
2.4 Penelitian Terdahulu	38
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	42
3.1 Kerangka Konseptual.....	42
3.2 Hipotesis Penelitian.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian	45
4.2 Jenis Data Dan Sumber Data.....	45
4.3 Metode Analisis.....	45

4.4 Defenisi Operasional Variabel	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Deskripsi Data	49
5.1.1 Deskripsi Data Penelitia	49
5.1.2 Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	49
5.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	51
5.1.4 Pengeluaran pemerintah melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan	53
5.1.5 Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	56
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	58
5.2.1 Hasil Model Regresi	58
5.3 Pembahasan	64
5.3.1 APBD dengan Pertumbuhan Ekonomi	64
5.3.2 Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	66
5.3.3 APBD dengan Kemiskinan	68
5.3.4 Inflasi dengan Kemiskinan	70
5.3.5 Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	71
5.3.6 APBD dengan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan ekonomi	73
5.3.7 Inflasi dengan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	75
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78

6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 5.1 Hasil Analisis Pengaruh Antar Variabel Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsng	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Koefisien Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung.....	47
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan tahun di empat kabupaten 2010-2022	50
Tabel 5.2	Pertumbuhan Ekonomi Provisis Sulawesi Selatan melalui PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan di empat kabupaten pada tahun 2010-2022.....	52
Tabel 5.3	Pengeluaran Pemerintah Melalui APBD tahun 2010-2022 di Provinsi Sulawesi Selatan pada empat kabupaten.....	54
Tabel 5.4	Inflasi empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2022.....	56
Tabel 5.5	Analisis Pola Pengaruh Masing-masing Variabel Secara Langsung.....	58
Tabel 5.6	Analisis Pola Pengaruh Variabel Secara Tidak Langsung..	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diantara masalah yang paling penting dari sifat global pada tahap sekarang yaitu sosial dan perkembangan budaya negara, yang mengatasi kemiskinan dari populasi yang akan datang. Sehubungan dengan runtuhnya sistem sosialis dunia, ledakan sosial besar terjadi dengan kemunduran transformasional yang tidak terhindarkan. Yang terakhir, tentu saja berdampak pada skala, struktur dan efisiensi aktivitas tenaga kerja dari populasi. Jumlah pekerjaan yang telah berkurang secara signifikan. Pekerjaan dari populasi adalah salah satu tugas utama pemerintah untuk mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi dan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan makro ekonomi dalam setiap negara.

Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat utama bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

Shah (Debby dkk, 2022) menjelaskan bahwa permasalahan sosial khususnya mengenai kemiskinan merupakan tantangan bagi negara-

negara berkembang di dunia. Seperti Indonesia baik di era klasik hingga kontemporer, jumlahnya yang sangat besar 1,7 milyar manusia di tahun 2008 dan diproyeksi akan terus mengalami peningkatan sampai lima kali lipat di tahun 2025 mengingat bertumbuhannya jumlah manusia di dunia setiap tahunnya mencapai 27 ribu jiwa.

Permasalahan penduduk miskin merupakan keadaan yang terpuruk bagi masyarakat yang mengalaminya dan didalam penduduk miskin terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah jenis kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi.

Fenomena kemiskinan telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia, terutama dinegara-negara berkembang yang umumnya berada di wilayah Asia maupun Afrika. Laporan dari Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank (ADB)* dalam (Jayani, 2011) mendeskripsikan bahwa pertumbuhan masyarakat miskin di Asia tidak hanya berkutik pada kemiskinan pada umumnya melainkan juga kemiskinan ekstrem, dimana pada tahun 2020 terdapat 104 juta penduduk Asia yang dikategorikan sebagai masyarakat ekstrem dengan penghasilan dibawah USD 1,9 PPP (Pendapatan Perkapita) atau jika dirupiahkan hanya sebatas 11 ribu rupiah perhari atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan kemiskinan biasa yang berpenghasilan 3,2 USD perhari (Arsiyana dkk, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan keadaan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 sebesar 4 persen atau 10,86 juta jiwa, sedangkan angka kemiskinan sebesar 26,5 juta jiwa atau 9,71 persen. Data ini menyebar luas di berbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satu daerah yang terdapat tingkat kemiskinan ekstrem adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan terdapat lima kabupaten dengan kategori kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan (Eko dkk, 2022).

Kabupaten yang tergolong daerah miskin ekstrem di Sulawesi Selatan berdasarkan tingginya kemiskinan yang terjadi pada daerah tersebut menurut BPS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep dengan jumlah kemiskinannya sebesar 39.609 ribu jiwa, Kabupaten Jeneponto sebesar 41.841 ribu jiwa, Kabupaten Bone sebesar 70.718 ribu jiwa, Kabupaten Luwu Utara sebesar 37.049 ribu jiwa dan Kabupaten Luwu sebesar 29.910 ribu jiwa.

Permasalahan kemiskinan ekstrem harus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, mereka harus mengambil kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang penepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Presiden menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada tahun 2024.

Peran pemerintah sangat penting dalam mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan pada setiap tahunnya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Son, 2006). Hal ini didilandasi pada teori *trickle-down effect* yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan PDB atau PDRB akan menetes dengan sendirinya sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan (Nainggolan, 2020).

Kraay (Haryanto dkk, 2013). Menjelaskan bahwa studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi. Pemerintah di Negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional.

Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode analisis lintas negara menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika pertumbuhannya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Tambunan (Nadia, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan perbaikan yang baik selama beberapa tahun ini tetapi tidak berarti bahwa permasalahan telah selesai. Walaupun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan menurut BPS Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2022 melanjutkan kinerja positif dengan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Sulsel tercatat tumbuh 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,28% (yoy). Namun pada saat yang bersamaan bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan memiliki kinerja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang makin menurun dan kemiskinan ekstremisasi terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Permasalahan ini harus diatasi dengan baik, salah satu solusinya pemerintah harus mengambil tindakan dalam mengatasi ini dengan mengambil kebijakan yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi meningkat dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan terutama pada kemiskinan ekstrem. Kebijakan pemerintah yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dan berdampak terhadap kemiskinan yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan inflasi.

Menurut Keynes (Wahyudi, 2020), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

De Fina juga menjelaskan (Pratama dan Utama, 2019). Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah.

Belanja daerah, atau dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin banyak belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dan

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan (Teddy dkk, 2016).

APBD merupakan gambaran atau tolak ukur penting dalam keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan mengalami pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah dan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan serta pengangguran, tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta kuasa penggunaan anggaran untuk dapat merangsang perekonomian menuju ke arah yang lebih baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya diharapkan akan mempercepat roda perekonomian. Belanja daerah dapat berpengaruh signifikan karena berhubungan dengan hal-hal yang dapat menjadi penyebab kemiskinan (Ishak, 2017).

Dana APBD normalnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hal-hal tersebut tentunya dapat menambah kesejahteraan masyarakat daerah. Dan jika jumlah belanja APBD bertambah, maka semakin banyak masyarakat yang sejahtera. APBD dapat bekerja langsung menaikkan pendapatan masyarakat kurang mampu (miskin dan rentan miskin) melalui belanja

program pemberdayaan atau padat karya dan dapat melalui fasilitasi pengembangan usaha berskala mikro dan kecil (Asyifa dkk, 2023).

Selain pengeluaran pemerintah, inflasi juga mempengaruhi kemiskinan. Tingkat Inflasi yang tinggi di suatu daerah sangatlah tidak baik bagi pengentasan kemiskinan karena jika harga barang terus naik maka masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan primer mereka sehingga mereka berada dalam kemiskinan (Kasim dkk, 2021). Menurut Imelia (Manula, 2021) inflasi juga menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Menurut Andiny dan Desrini (2018), Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan maka BankIndonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada

makin tingginya tingkat kemiskinan. Apabila inflasi mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan. Dimana inflasi naik akan mengakibatkan harga barang atau jasa akan naik sehingga daya beli masyarakat menurun yang akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga masuk kedalam garis kemiskinan (Ariska dkk, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah APBD berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh APBD terhadap kemiskinan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Sebagai bahan informasi dan referensi penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan.
2. Diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal mengatasi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep

2.1.1 Defenisi Kemiskinan

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan (Hapsari dan Umajah, 2018). Sedangkan kemiskinan menurut Todaro (2006) menyatakan bahwa keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah sehingga pendapatan rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya standar kualitas hidup atau rendahnya tingkat hidup.

Berbeda dengan yang dijelaskan dalam Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran perbulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan menurut Hakim (Manalu, 2021), adalah penjumlahan antaragaris kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan adalah garis kemiskinan yang mengacu pada

pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori perkapita perhari, sedangkan garis kemiskinan non makanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Penjelasan kemiskinan menurut Kuncoro (Khatimah, 2021), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Sedangkan menurut Kartasasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Friedman bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya. Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidak sanggupannya untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Secara statistik, pada 2019, kebanyakan orang di planet ini hidup dalam kemiskinan: Dalam dolar Paritas Daya Beli 85% hidup dengan kurang dari \$30 per hari, dua pertiga hidup dengan kurang dari \$10 per hari, dan 10% hidup dengan kurang dari \$30 per hari. \$1,90 per hari (kemiskinan ekstrim) Bahkan ketika negara-negara mengalami

perkembangan ekonomi, warga negara termiskin dari negara-negara berpenghasilan menengah sering kali tidak mendapatkan bagian yang memadai dari peningkatan kekayaan negara mereka untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah bereksperimen dengan sejumlah kebijakan dan program yang berbeda untuk pengentasan kemiskinan, seperti elektrifikasi di daerah pedesaan atau kebijakan perumahan pertama di daerah perkotaan. Kerangka kebijakan internasional untuk pengentasan kemiskinan dirangkum dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan: "Tanpa Kemiskinan" (Todaro & Smith, 2003).

Menurut SMERU Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu : 1. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan); 2. Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi; 3. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga; 4. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun massal; 5. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas; 6. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat; 7. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan; 8. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental; 9. Ketidakmampuan

sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

2.1.2 Jenis-jenis kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu: 1. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya; 2. Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Sedangkan Sastraatmadja (Manula, 2020), menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun; 2. *Cyclical poverty*,

yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan;

3. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.; 4. *Accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan secara dasar, maka BPS menggunakan tiga indikator kemiskinan, sebagai berikut: 1). Tingkat kemiskinan/*Head Count Index* (P0), adalah persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan. 2) Kedalaman kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1), adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 3) Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Indeks* (P2), adalah indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah :1) Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; 2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; 3) Kebijakan

pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; 4) Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; 5) Adanya perbedaan sumber dayamanusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional dan ekonomi modern); 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; 7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; 8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); 9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan Lingkungan.

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh Coombs menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan dan (3) pekerjaan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah (Khusnul Khatimah, 2021).

Berbeda dengan Beik (2016) yang menyatakan penyebab kemiskinan material lebih pada masalah ekonomis seseorang atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri serta keluarganya. Sedangkan penyebab kemiskinan spiritual disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta pemahaman agama karena pengaruh sekulerisme dan liberalism agama.

Penyebab kemiskinan ini dijabarkan menjadi beberapa penyebab, antara lain : 1) Ketidaktaatan umat Islam terhadap ajarannya, banyaknya kriminalitas dan segolongan orang yang memakan harta anak yatim; 2) Kelemahan manusia dalam memahami dan mengelola sumber daya alam yang ada; 3) Kemiskinan disebabkan oleh keegoisan sekelompok orang yang diberikan harta berlebih terhadap orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi. Ketidak patuhan orang kaya dalam mematuhi perintah Allah SWT untuk menunaikan kewajibannya terhadap hak-hak orang miskin; 4) Kurangnya Lapangan Pekerjaan Ini adalah alasan pertama yang dipikirkan banyak orang. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan yang baik, maka tidak mendapatkan penghasilan yang baik. Di banyak negara, pekerjaan tradisional seperti bertani menghilang, pekerjaan yang seharusnya menjadi penopang bangsa khususnya Indonesia; 5) Kurangnya Pendidikan yang baik Akar penyebab kemiskinan yang ketiga adalah kurangnya pendidikan. Kemiskinan adalah sebuah siklus dan tanpa pendidikan, orang tidak dapat memperbaiki situasi mereka. Menurut UNESCO, lebih dari 170 juta orang bisa bebas dari kemiskinan ekstrem jika mereka hanya memiliki keterampilan membaca dasar. Namun, di banyak wilayah di dunia, orang tidak mendapatkan pendidikan. Alasan bervariasi. Sering kali, keluarga membutuhkan anak-anak untuk bekerja, tidak ada sekolah di dekat sini, atau anak perempuan tidak dididik karena seksisme dan diskriminasi (Bintang & Woyanti, 2018); 6) Kurangnya pelayanan kesehatan yang baik kemiskinan adalah

penyebab dan akibat dari kesehatan yang buruk. Kemiskinan meningkatkan kemungkinan kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk, pada gilirannya, menjebak masyarakat dalam kemiskinan. Para penduduk sulit untuk mengakses layanan kesehatan juga termasuk dari penyebab terjadinya kemiskinan (Ningrum et al, 2020).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil suatu perekonomian riil atau pendapatan riil. Jadi suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi output riil. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi masyarakat, kapasitas ini bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Menurut Todaro (Daniel Manula, 2021), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Sedangkan menurut Untoro (Syahputra, 2017), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang

dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Sadono Sukirno (Rafika, 2021), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat bertambah. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

2.1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurung waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda. APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati / walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (Badrudin, 2012)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber pemerintah daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurung waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah. (Rotinsulu dkk, 2019).

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya belanja digolongkan menjadi 4 yaitu: Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup

defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2.1.7 Fungsi APBD

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2004, pasal 66 ayat 3 APBD mempunyai fungsi utama sebagai berikut: a) Fungsi otoritas, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, b) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam menerangkan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, c) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, d) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, e)

Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.1.8 Inflasi

Mulanya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam sebuah perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat yang diduga telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi dapat juga diartikan sebagai kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penawaran agregat (Ridha, 2019).

Pengertian yang lain inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang atau jasa yang harganya naik atau ada barang atau jasa yang harganya turun, namun ada juga barang atau jasa yang harganya tetap. Sedangkan menurut Boediono dalam buku Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus. Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan Suseno dan Siti Aisyah, inflasi secara singkat dapat didefinisikan sebagai kecenderungan menaikinya harga-harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus.

2.1.9 Jenis Inflasi

Menurut Atmadja (1999:58) Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Jenis inflasi sebagai berikut:

1. Menurut Derajatnya

Inflasi ringan di bawah 10% (single digit), inflasi sedang 10% - 30%, inflasi tinggi 30% - 100% dan hyperinflasi di atas 100%. Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal itu sangat bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat manakah yang terkena imbas (yang menderita) dari inflasi yang sedang terjadi.

2. Menurut Penyebabnya

Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan aggregate demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan menarik (pull) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi excess demand, yang merupakan inflationary gap. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi full-employment. Pengertian kenaikan aggregate demand seringkali ditafsirkan berbeda oleh para ahli ekonomi. Golongan moneterist menganggap aggregate demand mengalami kenaikan akibat

dari ekspansi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan menurut golongan Keynesian kenaikan aggregate demand dapat disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi; investasi; government expenditures; atau net export, walaupun tidak terjadi ekspansi jumlah uang beredar.

Cost push inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya aggregate supply curve ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan aggregate supply curve bergeser tersebut adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar komoditi. Dalam kasus cost push inflation kenaikan harga seringkali diikuti oleh kelesuan usaha.

3. Menurut Asalnya

Domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. *Imported inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (open economy system). Inflasi ini dapat 'menular' baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor.

Terlepas dari pengelompokan tersebut, pada kenyataannya inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika tidak boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu macam/jenis inflasi, tetapi sering kali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor-faktor ekonomi maupun pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar memiliki hubungan yang independen dalam suatu sistem perekonomian negara. Contoh: imported inflation seringkali diikuti oleh cost push inflation, domestic inflation diikuti dengan demand pull inflation, dsb.

2.1.10 Faktor-faktor Pemicu Inflasi

Menurut Saukat (2021) Angka inflasi merupakan angka gabungan (agregat) dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual di pasar. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu angka inflasi, antara lain: a) Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa, seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang dipasar (excess supply) dan harga/inflasi akan turun; demikian pula sebaliknya; b) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya dan tahun baru; c) Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter, dan kondisi perekonomian secara

keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang dan jasa.

2.2 Tinjauan Teoritis

Adolf Wagner

Apabila inflasi mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan. Dimana inflasi naik akan mengakibatkan harga barang atau jasa akan naik sehingga daya beli masyarakat menurun yang akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga masuk kedalam garis kemiskinan (Ariska dkk, 2021).

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hukum dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (De Fina, 2002).

Sedangkan teori lingkaran kemiskinan (Vicious Circle) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya tingkat pendidikan; (ii) ketidaksempurnaan pasar dan (iii)

kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh ketidakmampuan membayar upah yang layak). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.

Teori Harrod-Domar

Teori Harrod–Domar, teori ini bertujuan untuk menrangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau “steadygrowth” dalam jangka panjang. Analisis Harrod–Domar menggunakan pemisalan sebagai berikut: 1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh, 2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan Nasional, 3) Rasio modal produk (capitaloutputratio) tetap nilainya, 4) Perekonomian terdiri dari dua sektor. Teori Harrod menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan penerimaan negara.

Teori Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) merupakan ahli ekonomi yang pertama, yang mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam

mengemukakan teorinya tentang proses pertumbuhan ekonomi, pada tahun 1776 ditulis dalam bukunya yang berjudul "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Menurut Adam Smith, inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek yaitu: 1) Pertumbuhan output total, Menurut Adam Smith, pertumbuhan output total dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu sumber daya alam (atau faktor produksi tanah) yang tersedia, jumlah penduduk, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor yang paling pokok dari kegiatan produksi suatu masyarakat; 2) Pertumbuhan penduduk, Menurut Adam Smith perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi maka kegiatan ekonomi akan bertambah. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten.

Model pertumbuhan klasik oleh Adam Smith adalah $Y = f(L, K, T)$. Di mana Y adalah output, L adalah tenaga kerja, K adalah modal dan T adalah tanah. Sehingga output terkait dengan tenaga kerja, modal dan tanah. Akibatnya, pertumbuhan output didorong oleh pertumbuhan penduduk, investasi, pertumbuhan lahan, dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, ia melihat tabungan sebagai pencipta pertumbuhan investasi dan karenanya ia melihat distribusi pendapatan

sebagai salah satu penentu yang paling penting dari cepat atau lambat bangsa akan tumbuh (Sukirno dalam Putra, 2022).

Teori keynes

Sedangkan pengeluaran pemerintah menurut Keynes dikembangkan oleh Mankiw (Surgawati, 2020), untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kebijakan fiskal baik melalui penerimaan pemerintah yang berupa pajak (tax) maupun melalui pengeluaran pemerintah (government expenditure). Dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya ditandai dengan angka pengganda pengeluaran, yaitu angka yang menunjukkan besarnya kelipatan pertambahan output nasional jika terjadi penambahan pengeluaran investasi atau pengeluaran pemerintah. Angka pengganda itulah yang memberi sinyal adanya dampak kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek terjadinya kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk.

Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya.

Perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Menurut Keynes pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wahyudi, 2020).

Keynes juga menjelaskan tentang inflasi yang terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya sehingga harga barang secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah: 1) pemerintah yang mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran belanja negara, 2) pengusaha swasta yang menambah investasi baru dengan kredit dari bank, 3) pekerja/serikat buruh yang menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

Teori Kuantitas

Dalam teori Kuantitas, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap, sedangkan jumlah uang ditambah menjadi dua kali lipat, maka cepat atau lambat harga akan naik menjadi dua kali lipat.

Teori Strukturalis

Teori strukturalis disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang karena menyorot penyebab inflasi berasal dari struktur ekonomi khususnya supply bahan makanan dan barang ekspor. Pertambahan produksi barang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan akibatnya terjadi kenaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa.

Selanjutnya kenaikan harga barang yang merata maka inflasi yang terjadi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah uang beredar tapi harus diatasi dengan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan makanan dan barang ekspor.

2.3 Hubungan Antara Variabel

2.3.1 Hubungan variabel Pengeluaran Pemerintah/APBD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Murni (Mamuane dkk, 2021), Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar sepertinya sulit untuk menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan sering menimbulkan instability, inequity dan inefisiensi. Bila perekonomian sering dihadapkan pada ketidakstabilan, ketidakmerataan, dan ketidakefisienan jelas akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut peacock dan wiseman (Lubis dan Izzah 2020), menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar maka dari itu pengeluaran pemerintah akan menyebabkan GNP meningkat pula.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian, Wagner (Putra dkk,2003:14).

Sebagaimana dalam hasil penelitian yang dilakukan Najmi dkk (2022), Berdasarkan hasil estimasi dari Eviews diketahui bahwa nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 8.416 dengan nilai dari t -hitung $> t$ -tabel dimana $7.10265 > 1.70329$ maka diartikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini sebanding dengan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi Aceh. Ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Hubungan variabel Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Model Keynesian terdiri dari kurva Agregat Demand (AD) dan Agregat Supply (AS), yang tepat menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan. Banyak faktor yang mendorong tingkat inflasi dan tingkat output dalam jangka pendek. Ini termasuk perubahan: harapan;

tenaga kerja berlaku; harga faktor produksi lainnya, dan kebijakan moneter fiskal. Kurva jangka pendek AD dan AS menunjukkan hubungan yang positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek. Namun, ternyata untuk jangka panjang menunjukkan hubungan yang negatif.

Didukung dengan penjelasan Putra (2022), inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam perekonomian. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha, pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi dimasa datang dan pada akhirnya akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Jadi, laju inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yaitu semakin tinggi laju inflasi maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya jika laju inflasi rendah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Rosa, dkk (2019), Koefisien regresi inflasi (b_1) = -0,180 berarti jika inflasi naik 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y) turun 0,18059 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Secara teori inflasi dan pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif yaitu jika inflasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya.

Dalam penelitian inflasi yang terjadi jenis ringan dengan kategori rendah dan stabil sehingga dapat menjadi simulator bagi pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Hubungan variabel Pengeluaran Pemerintah/APBD dengan Kemiskinan

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hukum dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (De Fina, 2002).

Dalam penelitian Aini (2020), Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan perlindungan sosial memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya peningkatan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan perlindungan sosial akan mengurangi kemiskinan yang ada pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2.3.4 Hubungan variabel Inflasi dengan Kemiskinan

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi dapat menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya.

Apabila inflasi mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan. Dimana inflasi naik akan mengakibatkan harga barang atau jasa akan naik sehingga daya beli masyarakat menurun yang akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga masuk kedalam garis kemiskinan (Ariska dkk, 2021).

Menurut Imelia (Manalu, 2021) inflasi juga menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia". Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Indonesia".

2.3.5 Hubungan variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Menurut Kuncoro (Safuridar, 2017) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti: 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan Safuridar, 2017 Hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur dapat diterima. Hal ini sesuai dengan hasil persamaan regresi dengan koefisien pertumbuhan ekonomi bernilai negatif yaitu 0,055 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-5,263 < 1,895$ dan

dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Mari'atus S, dkk(2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan DI. Yogyakarta.

Millenia dan Zaini (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Ali Hardana, dkk (2022). Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tetapi Upah Minimum tidak berpengaruh.

Ningsih dan Andiny (2018). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial inflasi berpengaruh terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, secara simultan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0,350 (R Square) atau 35 persen dan 65 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Khaqiqi dan Syaifuddin (2021). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pematang, IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pematang, inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pematang, upah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pematang dan pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, dan upah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pematang.

Fajriansyah dan Chandriyanti (2022). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan untuk variabel lainnya berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum

provinsi (UMP) faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Bahar, dkk (2022), hasil penelitiannya menunjukkan sebesar 83.0% dapat menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Bone. sisanya sebesar 17.0% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model. Secara parsial PDRB perkapita dan inflasi positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone.

Lestari, dkk (2018), hasil penelitiannya menunjukkan berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas pertumbuhan penduduk, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara variabel bebas pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

Rivani (2021), hasil penelitiannya menunjukkan variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010-2020. Dari awal kemampuan daya beli yang tidak dimiliki masyarakat miskin tidak mempengaruhi kemiskinan, sehingga inflasi yang naik bukan penyebab bertambahnya kemiskinan perkotaan. Variabel

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan perkotaan di Indonesia pada tahun 2010-2020. Pada kenyataannya bertambahnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara tidak cukup mengurangi kemiskinan karena permasalahan tingginya ketimpangan yang banyak terjadi diberbagai negara khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perkotaan di Indonesia pada tahun 2010-2020. Upah minimum yang naik akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan yang mayoritas mengandalkan upah jasa sebagai pekerja. Semakin tinggi upah minimum akan semakin baik kehidupan masyarakat perkotaan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Untuk melihat antara variabel-variabel yang diteliti maka berdasarkan tujuan penelitian diatas, kerangka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu APBD dan inflas terdapat juga dua variabel dependen yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pengelokasian dananya. APBD memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, apabila anggaran APBD semakin meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun karena anggarannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskianan.

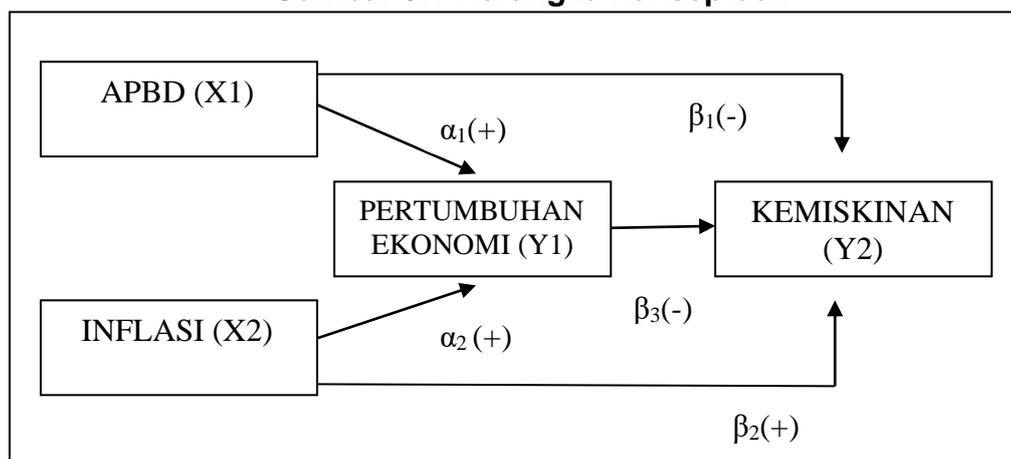
Inflasi adalah suatu masalah yang selalu dirasakan oleh masyarakat yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, karena apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus maka daya beli masyarakat akan berkurang dan menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan. Apabila inflasi mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan. Dimana

inflasi naik akan mengakibatkan harga barang atau jasa akan naik sehingga daya beli masyarakat menurun yang akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga masuk kedalam garis kemiskinan (Ariska dkk, 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, apabila pertumbuhan meningkat maka kemiskinan akan semakin berkurang.

Kedua variabel independen dan dua variabel dependen akan diregresikan untuk mengetahui tanda koefisien regresi dan tingkat signifikan diharapkan memberikan jawaban atas hipotesis penelitian. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka konseptual.



3.2 Hipotesis Penelitian

Dilihat dari penjelasan hubungan antar variabel dan penyusunan kerangka berpikir diatas tentang hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat baik secara terpisah maupun secarabersama-sama, maka penelitian ini menuntukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 :Diduga APBD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

H1a : diduga APBD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H1b : diduga APBD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan

H2 :Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

H2a: diduga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H2b: diduga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemismkinan

H3 :Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.